

Pemerintah Aceh dan KKP Teken MoU Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Category: Aceh

written by Redaksi | 22/07/2024



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
PEMERINTAH ACEH
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ACEH
NOMOR: 01/PSDKP/KKP/NK/V/2024
01/MOU/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (07-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PUNG NUGROHO SAKSONO** : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor B.223/MEN-KP/II/2024 7 Februari 2024, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BUSTAMI** : Pj. Gubernur Aceh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

[ORINEWS.ID](https://orinews.id), Banda Aceh – Pemerintah Aceh dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepakatan untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan di Aceh.

Nota Kesepakatan ditandatangani langsung oleh Pj. Gubernur

Aceh, Bustami, dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, Senin (22/7/2024).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pi, M.Si menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif bagi upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Aceh yang lebih baik dan lestari.

“Dengan adanya nota kesepakatan ini, kami berharap dapat mengatasi berbagai masalah yang selama ini menjadi tantangan di sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan” kata Aliman.

Tantangan tersebut meliputi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, masalah perizinan, transshipment di laut, serta penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan. Pelanggaran jalur dan daerah penangkapan ikan juga menjadi perhatian utama.

Aliman menambahkan, sektor budidaya perikanan di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perizinan, ekstensifikasi budidaya yang merusak mangrove, serta cara budidaya dan pengangkutan ikan yang tidak sesuai ketentuan.

“Kerjasama ini akan membantu kami meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa kegiatan budidaya perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Kerjasama ini mencakup berbagai program pengawasan terpadu di perairan Aceh, pengawasan pemanfaatan ruang laut, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan. Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan pertukaran data serta informasi yang relevan juga akan menjadi bagian penting dari inisiatif ini, kata Aliman, menjelaskan.

“Selain itu, kami akan fokus pada penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran serta barang

bukti, dan pertukaran data serta informasi terkait,” jelas Aliman.

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengawas perikanan dan petugas lainnya juga menjadi prioritas.

Nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani. “Kami berharap, melalui kerjasama ini, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, demi kesejahteraan masyarakat Aceh dan kelestarian lingkungan,” tutup Aliman. []